

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PUBLIKASI PRODUK HUKUM
PENGELOLAAN JDI HUKUM
T.A. 2019

A. LATAR BELAKANG

Program Revitalisasi dan Reformasi Hukum Nasional antara lain penataan regulasi dengan fokus kegiatan yaitu :

1. Penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Revitalisasi evaluasi peraturan perundang-undangan;
3. Penataan *database* peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, Biro Hukum mempunyai peran strategis dalam mengelola dan menyediakan informasi tentang produk-produk hukum dan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum pemerintah daerah. Selama ini keberadaan literatur dan dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan dan non peraturan perundang-undangan sebagai aset dokumentasi dan informasi hukum yang tersebar di setiap lembaga non pemerintah maupun non pemerintah.

Biro Hukum sebagai pusat JDIH Provinsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang publikasi produk hukum dan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum;
2. Menyiapkan bahan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
3. Menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumentasi di pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan publikasi produk hukum dan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum secara *offline* juga *online* tidak terlepas dalam perencanaan strategis untuk merumuskan indikator kinerja dalam kegiatan Publikasi Produk Hukum dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sehingga

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kepatuhan budaya hukum di semua lapisan masyarakat serta meningkatkan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan dapat diakses secara cepat juga mudah.

Untuk mengoptimalkan peran strategis dimaksud maka perlu dilaksanakan kegiatan publikasi produk hukum dan pengelolaan JDIH.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumen dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja ini merupakan dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan kegiatan Publikasi Produk Hukum dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dalam meningkatkan pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat dengan tujuan terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan menyediakan dokumentasi serta informasi hukum yang lengkap, akurat dan mudah diakses dengan cepat.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup/indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Publikasi Produk Hukum Di Pangkalan Data/Website;
2. Rapat/Bimbingan teknis Peningkatan JDIH dengan Kabupaten/ Kota;
3. Penilaian Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
4. Pembinaan Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
5. Konsultasi/Koordinasi/Rapat peningkatan JDIH.

E. SASARAN

1. Kegiatan Publikasi Produk Hukum Dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, meliputi :
 - a. Sasaran Publikasi Produk Hukum Di Pangkalan Data (Website) adalah terwujudnya data base tentang produk perundang-undangan Pusat maupun daerah sejumlah 90 perda yang lengkap, akurat dan mudah diakses dengan cepat;
 - b. Sasaran Rapat/Bimbingan Teknis Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan 35 Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah adalah terlaksananya koordinasi

dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dalam 3 kegiatan;

- c. Sasaran Penilaian Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum adalah terlaksananya koordinasi, pembinaan, pengembangan dan monitoring dalam pengelolaan dan peningkatan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di 35 Kabupaten/Kota ;
- d. Sasaran pembinaan anggota JDIH Kabupaten/Kota adalah terlaksananya pembinaan, pengembangan dan monitoring kepada anggota yang meliputi : organisasi, SDM, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, pemanfaatan TIK di 20 Kabupaten/Kota;
- e. Sasaran pelaksanaan Konsultasi /Koordinasi /Rapat Peningkatan JDIH adalah meningkatnya kapasitas dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan peningkatan pengetahuan dalam 12 kegiatan.

F. LOKASI KEGIATAN

- 1. Kegiatan Publikasi Produk Hukum Dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum :
 - a. Lokasi publikasi produk hukum di pangkalan data/website di Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Lokasi rapat/bimbingan teknis peningkatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan anggota (35 Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi Jawa Tengah);
 - c. Lokasi penilaian anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 35 Kabupaten/Kota;
 - d. Lokasi pembinaan anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di 20 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang masih memerlukan pembinaan;
 - e. Lokasi konsultasi /rapat /bintek/peningkatan kapasitas JDIH di Jakarta /Provinsi lain yang mendapatkan penilaian baik dari Badan Pembinaan Hukum Nasional.

G. JADWAL KEGIATAN.

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Publikasi produk hukum di pangkalan data/website 90 produk hukum	Jan-Des
2	Rapat/bimtek peningkatan JDIH dengan Kabupaten/Kota 3 kegiatan	April-Oktober
3	Penilaian anggota JDIH di 35 Kabupaten/Kota	Jan-Jul
4	Pembinaan anggota JDIH di 20 Kabupaten/Kota	Jan & Agust-Des
5	Konsultasi /koordinasi / rapat peningkatan JDIH Jateng (12 kegiatan)	Jan-Des

H. KELUARAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Publikasi Produk Hukum Dan Pengelolaan JDI Hukum yaitu jumlah produk hukum yang dipublikasi dan jumlah produk hukum yang didokumentasikan hukum baik *offline* maupun *online* yang berbasis teknologi sebagai upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum secara cepat, tepat serta akurat.

I. ANGGARAN

Rencana Anggaran dan Belanja Publikasi Produk Hukum Dan Pengelolaan JDI Hukum Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp 0,- |
| b. Belanja Barang Dan Jasa | Rp. 805.000.000,- |
| c. Belanja Modal | Rp. 45.000.000,- |

dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

J. PENUTUP

Dengan terlaksananya kegiatan Publikasi Produk Hukum Dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat Jawa Tengah terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam pelaksanaan pengembangan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum berbasis teknologi sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa informasi hukum secara cepat, tepat dan akurat.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan pada Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2019.

**KEPALA BAGIAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM
DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN JDIH
Selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

TTD

**ZRP. TJ. MULYONO, S.H., M.H.
NIP. 19670922 198903 1 004**